

Implementasi SIPD dalam pengajuan program kerja di desa ngampelsari

Oleh:

Nabilla Ananda Yuanita,

Ilmi Usrotin Choiriyah

Admnistrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Maret, 2026



Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi berbasis teknologi. Pemerintah Indonesia melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah menggunakan SIPD untuk mengajukan program kerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti penolakan program karena tidak sesuai kewenangan, keterbatasan kemampuan perangkat desa, serta minimnya pelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum berjalan optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya di Desa Ngampelsari.

Berdasarkan Tabel 1, tidak semua program kerja Desa Ngampelsari yang diajukan melalui SIPD tahun 2025 berhasil direalisasikan. Dari tiga program utama, dua kegiatan yaitu pembangunan paving dan saluran air di Perumahan Bumi Candi Asri belum terealisasi, sedangkan pembangunan fasilitas lingkungan di Perumahan Candiloka telah terealisasi pada Juni–Juli. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi, yang dipengaruhi oleh faktor kewenangan, teknis administrasi, serta proses seleksi di tingkat kabupaten, sekaligus mencerminkan masih terbatasnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme dan klasifikasi kewenangan dalam penggunaan SIPD.

Tabel 1. Status Terealisasi Program Kerja Desa Ngampelsari melalui SIPD Tahun 2025

Program Kegiatan	Status Terealisasi
Pembangunan Paving Perum BCA	Belum Terealisasi
Pembangunan Saluran Air Perum BCA	Belum Terealisasi
Pembangunan Fasilitas Perum Candiloka	Sudah terealisasi (Juni-Juli)

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aspek komunikasi dalam implementasi SIPD pada pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari?
2. Bagaimana aspek komunikasi dalam implementasi SIPD pada pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari?
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana (komitmen, pemahaman, dan respons perangkat desa) terhadap penggunaan SIPD dalam pengajuan program kerja?
4. Bagaimana struktur birokrasi dan kejelasan kewenangan memengaruhi efektivitas implementasi SIPD di Desa Ngampelsari?

Rumusan Masalah

Untuk mengetahui implementasi pengajuan program kerja berbasis SIPD di Desa Ngampelsari ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta sejauh mana sistem tersebut efektif dalam mendukung perencanaan dan realisasi pembangunan desa?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari, khususnya ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori George C. Edward III..

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator SIPD (Kaur Perencanaan), serta perangkat desa yang terlibat dalam pengajuan program kerja dan melalui observasi langsung.
- Data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi seperti daftar usulan program kerja desa, tangkapan layar (screenshot) SIPD, laporan realisasi pembangunan, peraturan terkait SIPD, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi SIPD di Desa Ngampelsari belum berjalan optimal. Masih terdapat kendala dalam pemahaman kewenangan antara desa dan kabupaten, sehingga beberapa program yang diajukan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima perangkat desa belum sepenuhnya jelas dan detail, terutama dalam aspek teknis pengajuan program.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penggunaan SIPD. Jumlah operator yang mampu mengoperasikan sistem masih sangat terbatas, serta kurangnya pelatihan menyebabkan perangkat desa belajar secara otodidak. Selain itu, sarana prasarana seperti perangkat dan jaringan internet juga belum sepenuhnya mendukung.

3. Disposisi

Dari sisi disposisi, perangkat desa memiliki komitmen dalam menggunakan SIPD, namun masih bersifat administratif. Motivasi penggunaan sistem belum didukung oleh pemahaman yang mendalam, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi SIPD masih lemah karena belum adanya SOP yang jelas di tingkat desa. Selain itu, koordinasi antar level pemerintahan belum optimal dan masih bergantung pada arahan dari kabupaten, sehingga memengaruhi kelancaran proses pengajuan program kerja.

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Ngampelsari menunjukkan bahwa digitalisasi perencanaan pembangunan telah berjalan, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, masih terdapat kendala dalam pemahaman kewenangan antara desa dan kabupaten yang menyebabkan beberapa usulan program ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima perangkat desa belum sepenuhnya jelas dan masih memerlukan penjelasan teknis yang lebih rinci.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah operator dan minimnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam penggunaan SIPD. Perangkat desa cenderung belajar secara mandiri, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan data. Sementara itu, dari aspek disposisi, meskipun perangkat desa memiliki komitmen dalam menjalankan sistem, namun pelaksanaannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendukung transparansi kepada masyarakat.

Selain itu, dari aspek struktur birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta koordinasi yang belum optimal antar level pemerintahan turut memengaruhi efektivitas implementasi SIPD. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan sumber daya, kejelasan komunikasi, sikap pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi yang memadai.

Temuan Penting Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Ngampelsari belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek komunikasi dan sumber daya. Kendala komunikasi terlihat dari masih adanya miskonsepsi terkait pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, yang menyebabkan beberapa usulan program ditolak meskipun dianggap prioritas oleh desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan, di mana hanya sebagian kecil perangkat desa yang mampu mengoperasikan SIPD, ditambah dengan minimnya pelatihan yang menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara otodidak.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa dari aspek disposisi dan struktur birokrasi, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun perangkat desa memiliki komitmen dalam menjalankan sistem, namun penggunaannya masih sebatas pemenuhan administratif dan belum sepenuhnya mendorong transparansi kepada masyarakat. Di sisi lain, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta lemahnya koordinasi antar level pemerintahan menyebabkan pelaksanaan SIPD masih bergantung pada arahan dari tingkat kabupaten. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas pelaksana di tingkat desa

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan berbasis digital di tingkat desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji digitalisasi pemerintahan dan tata kelola pembangunan berbasis sistem informasi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Ngampelsari dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun desa lain dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mampu meminimalisir kendala dalam proses perencanaan dan pengajuan program kerja.

Referensi

- [1] N. Citra, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *J. Apl. Akunt.*, no. July, pp. 1–23, 2023.
- [2] N. Amanah, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang," pp. 1–54, 2018.
- [3] N. Vitriana and M. Ahyaruddin, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Manage," *DIGIBIS Digit. Bus. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 64–77, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis64>
- [4] W. Wilansari, I. E. Jumiati, and L. Agustino, "Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak," *J. Ranah Publik Indones. Kontemporer*, vol. 2, no. 1, pp. 121–129, 2022, doi: 10.47134/rapik.v2i1.16.
- [5] S. N. Afifah, A. Subarno, and N. R. Akbarini, "Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo," *JIKAP (Jurnal Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran)*, vol. 7, no. 2, p. 171, 2023, doi: 10.20961/jikap.v7i2.62402.

